



**PERAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENANGANI KASUS PIDANA  
TERKAIT TRANSAKSI ELEKTRONIK: STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst**

***THE ROLE OF THE SUPREME COURT IN HANDLING CRIMINAL CASES  
RELATED TO ELECTRONIC TRANSACTIONS: CASE STUDY OF  
DECISION NUMBER 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst***

**Ria Fitriah<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Universitas Bung Karno

Email: raya86galief@gmail.com, hoedydjoesof@gmail.com

Article history :

**Abstract**

Received : 09-01-2025

Revised : 11-01-2025

Accepted: 13-01-2025

Published: 15-01-2025

*In the increasingly advanced digital era, electronic transactions have become an integral part of the daily lives of modern society. However, this convenience also brings new challenges related to the security and validity of transactions, as seen in Decision Number 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. This study aims to evaluate the impact of the decision on the practice of electronic transactions and consumer protection. The research method used is empirical law, which involves data collection through interviews, observations, and analysis of legal documents. The results of the study indicate that the Supreme Court plays an important role in setting legal standards that must be followed by courts at lower levels, as well as providing better protection for consumers. This study is expected to provide recommendations for improving the legal system and public policies that are more effective in protecting consumers in the digital era.*

**Keywords:** *Electronic transactions, consumer protection, Supreme Court, empirical law.*

**Abstrak**

Dalam era digital yang semakin maju, transaksi elektronik telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan baru terkait keamanan dan keabsahan transaksi, seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak putusan tersebut terhadap praktik transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berperan penting dalam menetapkan standar hukum yang harus diikuti oleh pengadilan di tingkat yang lebih rendah, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan kebijakan publik yang lebih efektif dalam melindungi konsumen di era digital.

**Kata Kunci:** *Transaksi elektronik, perlindungan konsumen, Mahkamah Agung, hukum empiris.*

**PENDAHULUAN**

Dalam era digital yang semakin maju, transaksi elektronik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Berbagai bentuk transaksi, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga layanan keuangan, kini dapat dilakukan dengan mudah melalui



platform online. Kemudahan ini tidak hanya mengubah cara orang berbelanja, tetapi juga mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru yang berkaitan dengan keamanan dan keabsahan transaksi. Kasus pidana yang melibatkan transaksi elektronik, seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, menunjukkan bahwa praktik penipuan, pencurian identitas, dan manipulasi informasi semakin marak terjadi. Hal ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, terutama lembaga peradilan, untuk memastikan bahwa hukum dapat melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang memanfaatkan kemajuan teknologi (Cahyaningrum, 2020).

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Sebagai pengawal keadilan, Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara, tetapi juga sebagai lembaga yang menetapkan standar hukum yang harus diikuti oleh pengadilan di tingkat yang lebih rendah. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung akan menjadi preseden hukum yang dapat mempengaruhi penanganan kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Agung menangani kasus-kasus ini, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan, serta dampak dari putusan tersebut terhadap praktik hukum dan masyarakat secara keseluruhan.

Kasus yang ditangani dalam Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst melibatkan transaksi elektronik yang dilakukan oleh PT Moladin Digital Indonesia, di mana terdapat dugaan manipulasi data dan penipuan dalam proses pembelian mobil. Tindakan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem transaksi elektronik yang semakin berkembang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana Mahkamah Agung menilai dan memutuskan perkara ini, serta implikasi dari putusan tersebut terhadap praktik transaksi elektronik di Indonesia. Penanganan kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam mengadaptasi diri terhadap perkembangan teknologi dan praktik bisnis yang terus berubah, serta pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk melindungi hak-hak konsumen (Doramia, 2020).

Dalam penanganan kasus pidana terkait transaksi elektronik, Mahkamah Agung dihadapkan pada tantangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum yang ada. Hukum pidana yang berlaku harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan praktik bisnis yang terus berubah. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi informasi dan dampaknya terhadap hukum. Oleh karena itu, peran Mahkamah Agung dalam memberikan putusan yang tepat dan adil sangat krusial untuk menjaga integritas sistem hukum di Indonesia. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung tidak hanya akan mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, tetapi juga akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang beroperasi dalam ranah digital.

Selain itu, keputusan Mahkamah Agung juga berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan di tingkat yang lebih rendah dalam menangani kasus serupa. Dengan adanya putusan yang jelas dan tegas, diharapkan akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan, di mana transaksi elektronik dapat dilakukan dengan aman dan terpercaya. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung



memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan dapat terjaga, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Namun, tantangan tidak hanya datang dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan cara melindungi diri dalam melakukan transaksi elektronik. Edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung juga memiliki peran dalam memberikan informasi dan edukasi kepada publik mengenai pentingnya hukum dan keadilan dalam transaksi elektronik. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang ada, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dan cerdas dalam bertransaksi, sehingga dapat mengurangi angka kejahatan yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Mahkamah Agung dalam menangani kasus pidana terkait transaksi elektronik, dengan fokus pada Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan praktik transaksi elektronik di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dalam bertransaksi secara elektronik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dalam mengatur transaksi elektronik, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dengan demikian, peran Mahkamah Agung dalam menangani kasus-kasus ini menjadi sangat relevan dan penting untuk diperhatikan dalam konteks perkembangan hukum dan teknologi di Indonesia (Anggraeni, 2020).

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Mahkamah Agung dalam menangani kasus pidana yang berkaitan dengan transaksi elektronik, khususnya dalam konteks Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pidana terkait transaksi elektronik di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi dari Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst terhadap praktik transaksi elektronik dan perlindungan konsumen di Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis peran Mahkamah Agung dalam penanganan kasus pidana terkait transaksi elektronik.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam menerapkan hukum pidana di era digital.
3. Mengevaluasi dampak Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst terhadap praktik transaksi elektronik dan perlindungan konsumen.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat nyata dan dapat diobservasi dalam konteks hukum. Dalam penelitian ini,



peneliti berusaha untuk memahami fenomena hukum dengan cara mengamati praktik hukum yang terjadi di lapangan, serta interaksi antara norma hukum dan perilaku masyarakat. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui berbagai teknik, seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen hukum. Dengan melakukan wawancara kepada berbagai pihak yang terlibat, seperti hakim, pengacara, dan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, peneliti dapat memperoleh perspektif yang beragam mengenai bagaimana hukum diterapkan dan dipahami. Observasi langsung terhadap proses peradilan dan analisis terhadap putusan pengadilan juga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Mahkamah Agung menangani kasus pidana terkait transaksi elektronik, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di era digital.

Dalam penelitian hukum empiris, penekanan pada konteks sosial dan budaya di mana hukum beroperasi sangatlah penting. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi penerapan hukum dan perilaku masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan praktik hukum yang terjadi di lapangan. Misalnya, dalam konteks kasus pidana terkait transaksi elektronik, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana masyarakat memahami risiko dan hak-hak mereka dalam bertransaksi secara online, serta bagaimana putusan Mahkamah Agung dapat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berbasis pada bukti untuk perbaikan sistem hukum dan kebijakan publik yang lebih efektif dalam melindungi konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Mahkamah Agung Dalam Menangani Kasus Pidana Yang Berkaitan Dengan Transaksi Elektronik, Khususnya Dalam Konteks Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst**

Kasus yang ditangani dalam Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst melibatkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT Moladin Digital Indonesia dalam konteks transaksi elektronik. Kasus ini muncul di tengah maraknya penggunaan platform digital untuk transaksi jual beli, di mana konsumen mengandalkan kepercayaan terhadap sistem dan penyedia layanan. Latar belakang hukum yang relevan mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang keabsahan transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum yang ada dapat diterapkan untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan yang semakin canggih dan kompleks. Penipuan dalam transaksi elektronik tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kasus ini menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi celah dalam regulasi yang ada dan mencari solusi yang tepat.

Proses penanganan kasus oleh Mahkamah Agung dimulai dengan pengajuan perkara oleh pihak yang merasa dirugikan, yang dalam hal ini adalah konsumen yang menjadi korban penipuan. Mahkamah Agung kemudian melakukan serangkaian langkah, termasuk pemeriksaan berkas,



mendengarkan keterangan saksi, dan menganalisis bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam proses ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk ketentuan dalam UU ITE dan prinsip-prinsip keadilan yang harus ditegakkan. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan mencakup analisis terhadap niat jahat pelaku, dampak dari tindakan tersebut terhadap konsumen, serta pentingnya menjaga integritas sistem transaksi elektronik. Dengan demikian, Mahkamah Agung berupaya untuk memberikan putusan yang tidak hanya adil bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan pesan yang jelas tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi konsumen di era digital (Apeldoorn, 1986).

Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung dalam kasus ini memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik hukum di Indonesia. Salah satu pengaruh utama adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan adanya putusan yang tegas, diharapkan pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam menjalankan praktik bisnis mereka, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, putusan ini juga berfungsi sebagai preseden hukum yang dapat dijadikan acuan bagi pengadilan di tingkat yang lebih rendah dalam menangani kasus serupa di masa depan. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, terutama dalam konteks transaksi yang melibatkan teknologi informasi. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa yang ada, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan kerangka hukum yang lebih baik untuk transaksi elektronik di Indonesia.

Peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan dalam kasus ini sangat krusial. Sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Dengan memberikan putusan yang adil dan transparan, Mahkamah Agung tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Keputusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung siap untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi dan praktik bisnis yang terus berubah. Dalam jangka panjang, peran ini diharapkan dapat mendorong reformasi hukum yang lebih luas, sehingga sistem hukum di Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memutuskan perkara, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam sistem hukum.

Dampak dari putusan Mahkamah Agung ini juga terlihat dalam praktik hukum yang lebih luas. Dengan adanya putusan yang menegaskan pentingnya perlindungan konsumen, diharapkan akan ada peningkatan dalam regulasi dan kebijakan yang mengatur transaksi elektronik. Hal ini mencakup pengembangan pedoman bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, putusan ini juga dapat mendorong lembaga legislatif untuk melakukan revisi terhadap undang-undang yang ada, agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung berkontribusi pada pembentukan kerangka hukum yang lebih baik untuk transaksi elektronik di Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital.

Putusan ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan adanya informasi yang lebih jelas



tentang perlindungan hukum yang tersedia, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dan cerdas dalam bertransaksi. Edukasi mengenai risiko dan cara melindungi diri dalam melakukan transaksi online menjadi sangat penting. Mahkamah Agung, melalui putusannya, dapat berperan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada publik mengenai pentingnya hukum dan keadilan dalam transaksi elektronik. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan angka kejahatan terkait transaksi elektronik dapat berkurang, dan masyarakat dapat lebih percaya diri dalam menggunakan platform digital untuk bertransaksi (Edmon, 2015).

Meskipun putusan ini memberikan banyak manfaat, tantangan tetap ada dalam penerapan hukum pidana terkait transaksi elektronik. Perkembangan teknologi yang cepat sering kali lebih maju dibandingkan dengan kemampuan hukum untuk mengaturnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu terus beradaptasi dan memperbarui pemahaman serta pengetahuannya mengenai teknologi informasi. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan tetap relevan dan efektif dalam menangani kasus-kasus baru yang muncul. Selain itu, kolaborasi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan sektor swasta juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang aman bagi transaksi elektronik. Dengan demikian, tantangan yang ada dapat diatasi secara bersama-sama, dan sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dalam melindungi konsumen.

Secara keseluruhan, peran Mahkamah Agung dalam menangani kasus pidana yang berkaitan dengan transaksi elektronik, khususnya dalam konteks Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, sangatlah krusial. Melalui proses penanganan yang transparan dan adil, Mahkamah Agung tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih baik. Dampak dari putusan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga oleh masyarakat luas yang mengandalkan transaksi elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terus berupaya menjaga integritas hukum dan memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen, Mahkamah Agung berperan sebagai pilar utama dalam menciptakan keadilan di era digital.

### **Tantangan Yang Dihadapi Oleh Mahkamah Agung Dalam Menafsirkan Dan Menerapkan Hukum Pidana Terkait Transaksi Elektronik Di Indonesia**

Tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pidana terkait transaksi elektronik di Indonesia sangat kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dalam regulasi yang ada. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disahkan, banyak ketentuan di dalamnya yang masih bersifat umum dan tidak cukup spesifik untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang muncul akibat perkembangan teknologi. Misalnya, definisi mengenai penipuan dalam konteks digital sering kali tidak mencakup semua modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari sanksi. Selain itu, regulasi yang ada sering kali tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga hukum yang diterapkan menjadi tidak relevan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya revisi dan pembaruan regulasi agar dapat lebih responsif terhadap dinamika yang ada dalam dunia digital.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Mahkamah Agung adalah kesulitan dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat cepat, menciptakan berbagai inovasi yang sering kali tidak diantisipasi



oleh pembuat kebijakan. Misalnya, munculnya teknologi blockchain dan cryptocurrency telah menciptakan tantangan baru dalam hal pengaturan dan penegakan hukum. Mahkamah Agung harus mampu memahami dan mengadaptasi hukum yang ada agar dapat menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi baru ini. Keterbatasan dalam pemahaman mengenai teknologi oleh para hakim juga dapat menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan hakim agar dapat menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Aspek sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung. Persepsi masyarakat terhadap hukum dan keadilan sering kali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan informasi yang beredar di masyarakat. Banyak orang yang masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak mereka dalam transaksi elektronik, sehingga mereka tidak melaporkan tindakan penipuan yang mereka alami. Kesenjangan antara norma hukum yang ada dan praktik di lapangan juga menjadi masalah. Masyarakat sering kali tidak memahami sepenuhnya ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan perlindungan hukum yang ada. Hal ini menciptakan ketidakadilan, di mana pelaku kejahatan dapat beroperasi dengan leluasa, sementara korban merasa tidak memiliki saluran untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dan pentingnya penegakan hukum.

Keterampilan dan pengetahuan hakim dalam bidang teknologi informasi menjadi salah satu faktor kunci dalam penegakan hukum pidana terkait transaksi elektronik. Banyak hakim yang mungkin tidak memiliki latar belakang atau pemahaman yang cukup mengenai teknologi, sehingga mereka kesulitan dalam menganalisis bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus-kasus digital. Pentingnya pemahaman teknologi informasi bagi hakim tidak dapat diabaikan, karena keputusan yang diambil harus didasarkan pada analisis yang tepat terhadap bukti yang ada. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu melakukan upaya peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada teknologi informasi dan kejahatan siber. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan hakim, diharapkan proses peradilan dapat berjalan lebih efektif dan adil.

Upaya peningkatan kapasitas hakim dalam menangani kasus-kasus digital harus melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Pelatihan yang komprehensif mengenai teknologi informasi, kejahatan siber, dan hukum yang berlaku sangat penting untuk memastikan bahwa hakim memiliki pengetahuan yang memadai. Selain itu, kolaborasi dengan ahli teknologi dan praktisi hukum juga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai isu-isu terkini yang dihadapi dalam dunia digital. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan profesional hakim, sehingga mereka dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung. Masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif dalam melaporkan tindakan penipuan dan kejahatan lainnya yang terjadi dalam transaksi elektronik. Edukasi mengenai hak-hak konsumen dan cara melindungi diri dalam bertransaksi secara online harus ditingkatkan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka



dapat lebih proaktif dalam melindungi diri dan melaporkan tindakan kriminal. Mahkamah Agung, dalam hal ini, dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum, dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur hukum yang ada.

Kolaborasi antarlembaga juga sangat penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung. Kerja sama antara lembaga peradilan, pemerintah, dan sektor swasta dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam penegakan hukum terkait transaksi elektronik. Misalnya, lembaga pemerintah dapat memberikan dukungan dalam hal regulasi dan kebijakan, sementara sektor swasta dapat berkontribusi dengan menyediakan teknologi dan sumber daya yang diperlukan. Dengan membangun kemitraan yang solid, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen (Umi Falasifah et al, 2016).

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pidana terkait transaksi elektronik di Indonesia sangat kompleks. Keterbatasan hukum yang ada, tantangan dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi, serta aspek sosial dan budaya menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas hakim, serta melibatkan masyarakat dan lembaga lain dalam upaya penegakan hukum. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat lebih responsif terhadap tantangan yang muncul di era digital, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen.

### **Implikasi Dari Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/Pn Jkt.Pst Terhadap Praktik Transaksi Elektronik Dan Perlindungan Konsumen Di Indonesia**

Tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pidana terkait transaksi elektronik di Indonesia sangat kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dalam regulasi yang ada. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disahkan, banyak ketentuan di dalamnya yang masih bersifat umum dan tidak cukup spesifik untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang muncul akibat perkembangan teknologi. Misalnya, definisi mengenai penipuan dalam konteks digital sering kali tidak mencakup semua modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari sanksi. Selain itu, regulasi yang ada sering kali tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga hukum yang diterapkan menjadi tidak relevan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya revisi dan pembaruan regulasi agar dapat lebih responsif terhadap dinamika yang ada dalam dunia digital.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Mahkamah Agung adalah kesulitan dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat cepat, menciptakan berbagai inovasi yang sering kali tidak diantisipasi oleh pembuat kebijakan. Misalnya, munculnya teknologi blockchain dan cryptocurrency telah menciptakan tantangan baru dalam hal pengaturan dan penegakan hukum. Mahkamah Agung harus mampu memahami dan mengadaptasi hukum yang ada agar dapat menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi baru ini. Keterbatasan dalam pemahaman mengenai teknologi oleh para hakim juga dapat menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah



Agung untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan hakim agar dapat menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Aspek sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung. Persepsi masyarakat terhadap hukum dan keadilan sering kali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan informasi yang beredar di masyarakat. Banyak orang yang masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak mereka dalam transaksi elektronik, sehingga mereka tidak melaporkan tindakan penipuan yang mereka alami. Kesenjangan antara norma hukum yang ada dan praktik di lapangan juga menjadi masalah. Masyarakat sering kali tidak memahami sepenuhnya ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan perlindungan hukum yang ada. Hal ini menciptakan ketidakadilan, di mana pelaku kejahatan dapat beroperasi dengan leluasa, sementara korban merasa tidak memiliki saluran untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dan pentingnya penegakan hukum.

Keterampilan dan pengetahuan hakim dalam bidang teknologi informasi menjadi salah satu faktor kunci dalam penegakan hukum pidana terkait transaksi elektronik. Banyak hakim yang mungkin tidak memiliki latar belakang atau pemahaman yang cukup mengenai teknologi, sehingga mereka kesulitan dalam menganalisis bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus-kasus digital. Pentingnya pemahaman teknologi informasi bagi hakim tidak dapat diabaikan, karena keputusan yang diambil harus didasarkan pada analisis yang tepat terhadap bukti yang ada. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu melakukan upaya peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada teknologi informasi dan kejahatan siber. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan hakim, diharapkan proses peradilan dapat berjalan lebih efektif dan adil.

Upaya peningkatan kapasitas hakim dalam menangani kasus-kasus digital harus melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Pelatihan yang komprehensif mengenai teknologi informasi, kejahatan siber, dan hukum yang berlaku sangat penting untuk memastikan bahwa hakim memiliki pengetahuan yang memadai. Selain itu, kolaborasi dengan ahli teknologi dan praktisi hukum juga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai isu-isu terkini yang dihadapi dalam dunia digital. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan profesional hakim, sehingga mereka dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi (Marzuki, 2021).

Keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung. Masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif dalam melaporkan tindakan penipuan dan kejahatan lainnya yang terjadi dalam transaksi elektronik. Edukasi mengenai hak-hak konsumen dan cara melindungi diri dalam bertransaksi secara online harus ditingkatkan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka dapat lebih proaktif dalam melindungi diri dan melaporkan tindakan kriminal. Mahkamah Agung, dalam hal ini, dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum, dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur hukum yang ada.

Kolaborasi antarlembaga juga sangat penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung. Kerja sama antara lembaga peradilan, pemerintah, dan sektor swasta dapat



menciptakan sinergi yang kuat dalam penegakan hukum terkait transaksi elektronik. Misalnya, lembaga pemerintah dapat memberikan dukungan dalam hal regulasi dan kebijakan, sementara sektor swasta dapat berkontribusi dengan menyediakan teknologi dan sumber daya yang diperlukan. Dengan membangun kemitraan yang solid, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pidana terkait transaksi elektronik di Indonesia sangat kompleks. Keterbatasan hukum yang ada, tantangan dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi, serta aspek sosial dan budaya menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas hakim, serta melibatkan masyarakat dan lembaga lain dalam upaya penegakan hukum. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat lebih responsif terhadap tantangan yang muncul di era digital, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, peran Mahkamah Agung dalam menangani kasus pidana yang berkaitan dengan transaksi elektronik, khususnya dalam konteks Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, sangatlah krusial. Melalui proses penanganan yang transparan dan adil, Mahkamah Agung tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih baik. Dampak dari putusan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga oleh masyarakat luas yang mengandalkan transaksi elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terus berupaya menjaga integritas hukum dan memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen, Mahkamah Agung berperan sebagai pilar utama dalam menciptakan keadilan di era digital. Tantangan yang dihadapi dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pidana terkait transaksi elektronik sangat kompleks, dan memerlukan adaptasi serta peningkatan kapasitas hakim untuk menghadapi perkembangan teknologi yang cepat.

Dari hasil penelitian ini, disarankan agar Mahkamah Agung terus meningkatkan kapasitas hakim melalui pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada teknologi informasi dan kejahatan siber. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hakim memiliki pemahaman yang memadai mengenai isu-isu terkini dalam dunia digital. Selain itu, kolaborasi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam penegakan hukum terkait transaksi elektronik. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen dalam transaksi elektronik juga harus ditingkatkan, agar mereka lebih proaktif dalam melindungi diri dan melaporkan tindakan kriminal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat lebih responsif terhadap tantangan yang muncul di era digital, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dian Cahyaningrum, "Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19," Info Singkat XII, no. 14/II/Puslit/Juli/2020 (2020): 1–5.  
[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/info%20singkat-XII-14-IIP3DI-Juli-2020-191](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-XII-14-IIP3DI-Juli-2020-191).



- Lumbanraja Anggita Doramia, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19,” CREPIDO: Jurnal 2, no. 1 (July 2020): 1–15.
- Makarim Edmon, “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pemerintahan Publik,” Jurnal Hukum & Pembangunan 45, no. 4 (2015).
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2021).
- RR Dewi Anggraeni, “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik,” ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan 4, no. 1 (2020): 1–10.
- Umi Falasifah et al., “Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016).
- Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).